

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

Pada kajian teori ini akan membahas beberapa pengertian, konsep, serta pandangan tentang sesuatu yang disusun secara rapi. Kajian teori merupakan sebuah landasan dalam penelitian, oleh karena itu membutuhkan landasan dan dasar untuk sebuah penelitian. Dalam hal ini, kajian teori merupakan suatu langkah bahwasannya bagaimana penelitian itu dianggap bagus atau tidak. Dalam sebuah kajian teori tentunya akan mengambil paling sedikit satu teori yang berkaitan dengan objek penelitian dan akan digunakan dalam penelitiannya nantinya. Maka dari itu peneliti akan menulis beberapa teori untuk keberlangsungan sebuah penelitian.¹

1. Kebijakan Publik

a. Definisi kebijakan publik

Kebijakan publik berasal kata *policy*, yang kemudian kebijakan publik diartikan sebagai prinsip atau sebuah tindakan yang diambil untuk sebuah keputusan serta sebagai suatu pedoman untuk sebuah tindakan. Kebijakan publik juga diartikan sebagai suatu jawaban atas usulan dan suatu keluhan kesah masyarakat melalui sistem politik yang berdasar pada kekuasaan pemerintah. Dalam arti kata lain, kebijakan publik merupakan sebuah keputusan yang diambil pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan publik. Arti kata publik sendiri adalah masyarakat, perusahaan, negara atau sistem politik, serta sebuah pengadministrasian. Kemudian dalam hal ini pemerintah diartikan sebagai orang atau kelompok yang diberikan wewenang dari sistem politik yang melakukan kebijakan terhadap semua sistem yang ada ditingkat pemerintahan paling kecil (RT dan RW) sampai dengan hubungan luar negara.²

Dewasa ini kebijakan publik adalah sebuah cabang ilmu yang pertumbuhannya sangat signifikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya kebijakan publik. Dalam arti lain kebijakan publik dapat diartikan sebagai multidisplin dan masih membutuhkan kolaborasi antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya, dalam kehidupan tentunya. Kebijakan publik

¹ Laeli Nur Azizah, 'Kajian Teori: Pengertian, Contoh & Cara Membuat', *Gramedia* <<https://www.gramedia.com/literasi/kajian-teori/>>.

² Monica Ayu Caesar Isabela, 'Kebijakan Publik: Ciri, Unsur, Dan Jenis', *Kompasi.Com* <<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/16/02000021/kebijakan-publik--ciri-unsur-dan-jenis>>.

ini tentunya tidak berdiri sendiri, kebijakan publik bermula atau berakar dari ilmu politik yang memang tidak hanya untuk memonopoli ilmu politik saja. Sehingga ruang lingkup kebijakan publik ini meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, akan tetapi juga berperan secara regulative untuk menyelesaikan permasalahan.³

Kebijakan publik tidak hanya diartikan dalam pandangan umum saja, tidak hanya diartikan sebagai keputusan yang diambil pemerintah berdasar pada usulan dari masyarakat. Kebijakan publik juga diartikan oleh beberapa tokoh, salah satunya adalah **Donald F. Kettl**. Menurutnya kebijakan saat ini memasuki milenium ketiga yang bersangkutan dengan administrasi publik dengan dihadapkannya empat isu kritical. Pertama, struktur yang berkenaan dengan tantangan menguatnya swasta dan berkurangnya pemerintah (*best government is least government*). Kedua, adanya administrasi kebijakan publik yang pada kenyataannya bersumber pada defisit yang terbesar dari setiap negara merupakan sebuah proses penyelenggaraan administrasi publik. Ketiga, nilai yang bersangkutan dengan adanya *entrepreneurial government*. Keempat, kapasitas yang mungkin menyangkut sebuah kecakapan administratur publik *me manage* urusan-urusan publik. Dalam hal ini kebijakan publik dapat diartikan sebagai kebijakan yang memberikan dukungan kepada warganya untuk memiliki rasa daya saing, bukan untuk menjuruskan ke pola ketergantungan terhadap orang lain atau bahkan negara. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa bagaimana kebijakan publik ini penting, kebijakan publik ini juga melalui beberapa proses yakni perumusan kebijakan, implementasi, dan yang terakhir adalah dilakukannya evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilakukan.

Pada kehidupan sehari-hari atau bahkan setiap yang dilakukan oleh seseorang atau pemerintah pastinya memiliki tujuan tertentu, begitupun dengan kebijakan publik. Kebijakan publik ini memiliki tujuan untuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai tujuan bersama yang memang telah disepakati bersama. Berikut gambaran tabelnya:

³ M.Pol.Admin drs.h.abdul kahar badjuri, drs. teguh yuwono, *Kebijakan Publik (Konsep & Strategi)* (semarang, 2002).

Tabel 2.1
Urutan Pelaksanaan Kebijakan Publik

Kebijakan Publik		
Masyarakat pada masa awal	Masyarakat pada masa transisi	Masyarakat yang dicita-citakan

Dari gambaran tabel diatas jelas bahwa kebijakan publik merupakan salah satu jalan untuk mencapai tujuan bersama yang sudah dicita-citakan. Apabila cita-cita Bangsa Indonesia ialah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasar pada ideologi Bangsa Indonesia yakni Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan) serta UUD 1945 (NKRI yang berdasar pada hukum dan bukan karena kekuasaan), maka kebijakan publik lah sebagai jalan dan sarana prasarana untuk mencapai sebuah tujuan. Dari gambar tersebut kebijakan publik juga merupakan sebagai manajemen untuk mencapai tujuan Nasional.⁴

Pada dasarnya politik ialah *art of the possibility* atau seni membuat sesuatu yang tidak mungkin terjadi menjadi mungkin terjadi. Praktiknya, politik merupakan sebuah sarana untuk memperebutkan kekuasaan untuk memimpin sebuah negara guna mencapai tujuan suatu bangsa. Tujuan Bangsa Indonesia sudah jelas terpampang di ideologi Bangsa Indonesia, yakni adil dan makmur. Akan tetapi dunia memiliki perspektif yang berbeda dengan apa yang digunakan oleh Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, dan juga Presiden Megawati. Pada masa Soekarno memilih jalan populis-politik yang dapat dikatakan hasilnya jauh dari target yang diinginkan, dan bahkan jatuh karena krisis politik. Kemudian pada zaman Soeharto lebih memilih jalan pragmatis-elitis-ekonomi yang mampu mencapai tujuan akan tetapi rapuh didalam atau bisa disebut kegagalan diakhir dan jatuh karena adanya krisis ekonomi. Dilanjutkan pada masa Habibie memilih untuk menstabilkan keadaan, akan tetapi terdapat krisis kepercayaan. Sehingga pada era Abdurrahman Wahid memilih jalan untuk memberikan akses berdemokrasi secara absolut, sehingga biaya yang dikeluarkan cukup mahal. Sehingga

⁴“Nugroho, Riant. Kebijakan Publik(Formulasi, Implementasi dan Evaluasi). PT Elex Media Komputindo. Jakarta. Gramedia:2003. Hal:49-55”.

Megawati pun belajar dari kegagalan pendahulunya yang kemudian memilih jalan mencapai tujuan dengan dilaksanakannya pembangunan yang ambigu dan juga penuh dengan keraguan.⁵

Secara tidak langsung kebijakan publik ini terbagi menjadi dua bagian, yakni kebijakan publik dapat diartikan sebagai kebijakan yang telah diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan untuk dikerjakan. Kedua kebijakan publik ini diputuskan oleh pemerintah yang tak lain bisa bersifat memaksa. Seperti adanya pengelolaan BUMN yang mengelola persenjataan, telekomunikasi, pelabuhan besar dan juga bandar udara, pemerintah memilih mengelola itu semua pastinya tanpa sebab, alasannya adalah karena usaha-usaha tersebut bersifat strategis baik secara politik atau bahkan keamanan.⁶

Pada dasarnya kebijakan publik ini memerlukan Implementasinya guna untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seseorang atau kelompok yang memiliki sebuah kebijakan. Dalam konteksnya terdapat 2 pilihan untuk mengimplementasikan kebijakan publik itu sendiri, pertama dengan cara mengimplementasikan kebijakan publik dengan program-program yang ada dan sudah dirancang. Kedua, mengimplementasikan kebijakan publik dengan cara memformulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik yang ada. Kemudian kebijakan publik ini membentuk Undang-Undang atau bahkan Perda yang merupakan salah satu kebijakan publik. Kebijakan publik ini masih memerlukan kebijakan yang jelas atau biasa disebut dengan Peraturan Pelaksanaan. Implementasi kebijakan publik ini melalui berbagai rangkaian, yakni dimulai dari program, proyek, hingga kegiatannya. Mekanisme ini memang lazim dilaksanakan dalam kebijakan publik. Apabila kebijakan publik ini dilakukan dengan cara formulasi maka yang akan terjadi adalah adanya Visi Misi, rencana, strategi, program, proyek, kegiatan, dan tentunya umpan balik yang akan diterima.⁷

⁵“Nugroho, Riant. Kebijakan Publik(Formulasi, Implementasi dan Evaluasi). PT Elex Media Komputindo. Jakarta. Gramedia:2003. Hal:49-55”.

⁶“Nugroho, Riant. Kebijakan Publik(Formulasi, Implementasi dan Evaluasi). PT Elex Media Komputindo. Jakarta. Gramedia:2003. Hal:49-55”.

⁷“Nugroho, Riant. Kebijakan Publik(Formulasi, Implementasi dan Evaluasi). PT Elex Media Komputindo. Jakarta. Gramedia:2003. Hal:158-160”

Tujuan dari diadakannya kebijakan publik merupakan melakukan intervensi, oleh karena itu implementasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan intervensi itu sendiri. Urutan dari intervensi itu sendiri yakni, identifikasi masalah yang harus diintervensi, menegaskan tujuan yang akan dicapai, dan merancang struktur proses implementasi yang akan dilaksanakan. Apabila kebijakan ini telah dilakukan maka yang perlu dilakukan adalah pengkoordinasian tugas yang akan dilaksanakan, kepemimpinan guna memimpin terlaksananya kebijakan publik, dan juga pengendalian pelaksanaan kebijakan publik.⁸

Dengan adanya kebijakan publik dan implementasinya, pastinya juga perlu adanya evaluasi. Evaluasi ini merupakan salah satu mekanisme yang harus dilaksanakan pengadaaan kebijakan publik. Evaluasi ini dilaksanakan guna melihat seberapa besar keefektifan kebijakan publik itu dilaksanakan agar dapat dipertanggungjawabkan oleh konstituennya, dan sejauh mana kebijakan publik ini dicapai, sehingga konstituennya dapat melihat apakah masih ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Evaluasi kebijakan publik ini dapat dilaksanakan dari evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan dan juga evaluasi lingkungan kebijakan. Dengan begitu evaluasi kebijakan ini akan menilai bagaimana kebijakan publik dikerjakan dengan keberhasilan atau bahkan ketidakgunaan.⁹

Dari penjabaran diatas, maka diperlukan dimensi yang juga harus diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan publik, supaya kebijakan tersebut dapat terlaksana dan juga dapat ditetapkan untuk mencapai tujuan. Kemudian untuk pencapaian yang maksimal terhadap pelaksanaan kebijakan publik, keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik ini melibatkan berbagai lembaga secara partisipatif dan juga demokratis. Pembuat kebijakan dan juga lembaga ini secara bersamaan saling terkait dalam proses analisis dan pelaksanaan kebijakan publik. Sehingga dalam pelaksanaan kebijakan publik ini perlu diadakannya evaluasi sebagai bentuk penilaian dan kinerja yang telah dilaksanakan. Dalam hal ini ada tiga tahapan dalam evaluasi kebijakan publik:

⁸ “Nugroho, Riant. Kebijakan Publik(Formulasi, Implementasi dan Evaluasi). PT Elex Media Komputindo. Jakarta. Gramedia:2003. Hal:161-162”

⁹ “Nugroho, Riant. Kebijakan Publik(Formulasi, Implementasi dan Evaluasi). PT Elex Media Komputindo. Jakarta. Gramedia:2003. Hal:183-184.”

1) Evaluasi pada tahap perencanaan

Pada tahap ini disebut juga dengan *ex-ante* yang berarti kebijakan dapat dilaksanakan dengan memilih jalur alternatif prioritas dari berbagai alternatif yang telah dirumuskan. Dengan tujuan evaluasi tahapan ini merupakan bentuk untuk menghindari penilaian awal yang diberikan pada kebijakan yang ditentukan. Selain itu juga memberikan informasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah dilakukan. Pelaksanaan kebijakan ini juga dapat memberi kajian awal yang mempengaruhi lingkungan.

2) Evaluasi pada tahap pelaksanaan

Tahap ini juga disebut dengan *on-going*, dimana evaluasi tahap ini bertujuan untuk menentukan kemajuan pelaksanaan kebijakan dibandingkan dengan proses awal kegiatan. Evaluasi ini memiliki tujuan untuk memastikan akan pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jika ada kesalahan yang terjadi ketika pelaksanaan evaluasi maka segera ditangani melalui penilaian *on-going* dengan proses rekomendasi. Tujuan lain dari tahap ini adalah memberikan informasi yang berhubungan dengan proses pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

3) Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan

Pada tahap evaluasi ini juga disebut dengan *ex-post*, dimana evaluasi ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa tingkat ketercapaian pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini juga memiliki tujuan sebagai analisis tingkat pencapaian kebijakan. Pada tahap ini juga dapat mengetahui efektivitas dan juga efisiensi pelaksanaan kebijakan yang sudah dilaksanakan.¹⁰

Ketiga tahap ini harus dilakukan pada setiap proses pelaksanaan kebijakan supaya dapat menilai sejauh mana pelaksanaan kebijakan ini dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Dalam proses penilaian memiliki kriteria tersendiri, di Indonesia menggunakan penggabungan dari tiga bentuk penilaian. Oleh sebab itu objek kebijakan yang dilakukan memiliki sumber yang luas dan juga sumber daya yang variatif guna memastikan bahwa kebijakan ini

¹⁰ Ramdhani and Ramdhani.

dilaksanakan sesuai dengan rencana, tepat sasaran dan juga dapat memecahkan masalah.¹¹

Dari ketiga tahapan pelaksanaan kebijakan publik, tentunya dalam hal ini memiliki elemen-elemen penting yang dapat mencapai pelaksanaan kebijakan publik, elemen-elemen tersebut seperti ; input yang meliputi manusia sebagai aktor, pengetahuan & teknologi, informasi dan juga nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik. Kemudian tujuan, dimana tujuan ini mengarahkan pada keputusan yang akan dicapai oleh pembuat kebijakan publik. Selanjutnya adalah perangkat atau alat-alat yang dapat digunakan untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut. Kemudian elemen selanjutnya adalah dampak, dimana dampak ini berupa hasil yang diinginkan dari pelaksanaan kebijakan, baik itu dampak yang bagus atau dampak yang buruk.¹²

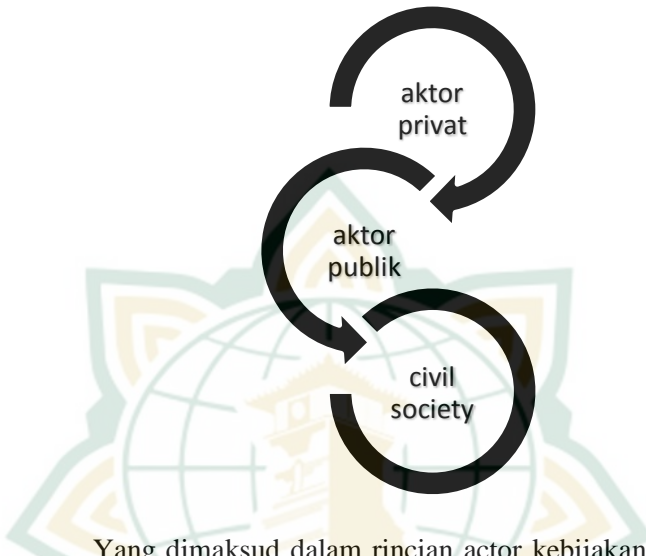
Kemudian pada tahapan-tahapan yang dilaksanakannya kebijakan publik tentunya memiliki aktor atau pelaku yang melakukan atau bahkan yang membuat kebijakan publik itu sendiri, sehingga tahapan-tahapan tersebut dapat berjalan sesuai harapan yang diinginkan. Dalam hal ini aktor kebijakan publik dapat dikategorikan ke tiga bagian utama, yakni aktor publik, aktor privat dan juga masyarakat(*civil society*). Tiga aktor utama ini berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan publik, sehingga kebijakan publik ini dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang kita mau.¹³

¹¹ Desrinelti, Afifah, and Gistituati.

¹² Nuryanti Mustari, 'Pemahaman Kebijakan Publik(Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik)', *Kebijakan Publik Deliberatif*, 1 (2015), 286.

¹³ Kabupaten Probolinggo, 'Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Analisis Peran Aktor Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Sanitasi', 6.3 (2020), 415–22.

Gambar 2.1
Aktor Kebijakan Publik



Yang dimaksud dalam rincian actor kebijakan publik ini meliputi kementerian, kabinet dan juga departemen yang dinaungi oleh presiden. Yang mana fungsi departemen ini saling terkait satu sama lain dengan proposal kebijakan yang akan dibuat, proposal ini bisa dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya. Kemudian lembaga eksekutif juga memiliki peran yang sangat besar dalam berjalannya kebijakan publik, yang mana mereka ini memiliki otoritas yang tinggi dalam pemutusan kebijakan. Yang dalam pembuatannya memerlukan inovasi yang mampu memberikan kebijakan-kebijakan baru yang bisa saja menjadi modal utama dalam *step by step* pembuatan keputusan. Gubernur dan Bupati merupakan aktor yang juga berperan dalam pembuatan kebijakan publik, dimana penyusunannya masih dalam tahap penyusunan kebijakan local atau yang biasa dikenal atau disebut dengan Peraturan Daerah. Kemudian aktor dalam ruang *lingkup civil society* ini juga meliputi banyak hal yang bersifat asosiasi yang mana dapat berkembang dimasyarakat umum. Struktur ini meliputi LSM, rukun tetangga, dan juga kelompok yang ada dalam masyarakat(RT & RW). Dalam hal ini juga mempengaruhi proses pembuatan kebijakan yang juga memang dianggap mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik.¹⁴

¹⁴ drs.h.abdul kahar badjuri, drs. teguh yuwono.

Penjelasan singkatnya adalah aktor state dibantu oleh aktor private yang kemudian aktor state dibantu oleh aktor masyarakat (*civil society*). Dalam ruang lingkupnya aktor state ini merupakan lembaga Eksekutif, Legislatif serta Yudikatif. Lembaga Legislatif ini masih berhubungan dengan tugas politik yang ruang lingkupnya sentral dan dalam pembuatan peraturan serta pembentukan kebijakan dalam suatu sistem politik. Kemudian lembaga Eksekutif(presidensial) berperan sebagai pembuatan kebijakan yang posisinya sangat penting, sehingga masih terlibat dalam rapat kabinet atau presidensial. Sedangkan lembaga Yudikatif merupakan lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi kebijakan publik dengan melalui penyajian kembali suatu UU atau bahkan peraturan melalui peninjauan, Yudisial, dan juga penafsiran Undang-Undang. Sehingga tinjauan ini adalah sebuah kekuasaan pengadilan untuk menentukan tindakan yang diambil oleh Eksekutif dan juga Legislatif.

Selanjutnya aktor state ini dibantu oleh aktor private, aktor ini berperan untuk memberikan informasi tertentu dan juga memberikan alternatif tertentu kepada pihak aktor state. Sehingga aktor private ini sering kali memberikan banyak informasi atau bahkan hal-hal yang bersifat teknis, mengenai sebab akibat yang mungkin terjadi dari suatu usulan kebijakan, sehingga dapat memberikan rasionalitas pembuatan kebijakan. Kemudian aktor private ini sering kali memberikan tugas ke *civil society* (masyarakat sipil), yang tugasnya untuk membuat kebijakan yang biasanya diberikan ke pejabat publik tertentu, dalam keadaan tertentu individu masih memiliki peluang untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan kebijakan.

Terlepas dari penjelasan diatas, kebijakan publik sendiri memiliki beberapa aspek yang dapat mempengaruhi berjalannya kebijakan publik itu sendiri. Aspek ini adalah sebuah proses step by step yang dilasanakan setelah kebijakan itu dibuat dan sebelum dampak kebijakan publik itu terjadi. Pada tahap pelaksanaan kebijakan publik ini terlihat dari beberapa aspek, antara lain adalah:

- 1) Struktur Birokrasi/kewenangan. Dalam hal ini kewenangan dapat diartikan sebagai suatu otoritas atau sebagai legitimasi yang seseorang yang melakukan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Kemudian kewenangan ini erat dengan kedudukan setiap individu maupun suatu lembaga dalam setiap proses kebijakan.

- 2) Komunikasi. Komunikasi adalah sebuah kegiatan yang dapat memberikan rangsangan terhadap setiap individu dalam bentuk sebuah rangsangan ide gagasan atau system yang berupa signal, symbol, lisan maupun perilaku. Dalam hal ini komunikasi merupakan suatu aspek yang paling mempengaruhi untuk berjalannya kebijakan publik. Sehingga komunikasi ini memberikan dampak yang baik maupun yang buruk terhadap pelaksanaan kebijakan publik.
- 3) Sumber daya. Dalam pelaksanaan kebijakan publik tentunya tidak luput dari berbagai aspek, salah satunya adalah sumber daya. Dimana sumber daya ini merupakan suatu hal yang dapat menunjang keberlangsungan kebijakan public, seperti sumber daya manusia, materi, dan sebuah metode untuk pelaksanaan. Sehingga dalam pelaksanaan kebijakan public perlu ketelitian dan terarah, jika dalam pelaksanaan kebijakan publik ini kekurangan sumber daya maka yang akan terjadi adalah kegiatan tersebut tidak akan terlaksana secara maksimal.
- 4) Disposisi atau sikap pelaksana. Disposisi adalah sebuah watak atau sifat atau tabiat yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan publik, watak ini dapat berupa kejujuran, kedisiplinan, kecerdasan dan sebuah komitmen yang diambil. Jika pelaksana kebijakan publik ini memiliki disposisi yang baik, maka yang terjadi adalah kebijakan publik ini dapat dilakukan dengan baik dan maksimal, begitu pula sebaliknya.¹⁵

Dari penjelasan diatas, tentunya kebijakan publik ini tidak luput dari 4 aspek tersebut, yang juga merupakan komponen-komponen yang saling terkait dan juga saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam pelaksanaan kebijakan publik tentunya memuat konsep tertentu, kebijakan publik yang ada di Indonesia sendiri menganut *good governance*. Untuk mencapai hal tersebut tentunya memerlukan sebuah effort, yang dapat diketahui melalui pencapaian-pencapaian yaitu :

- 1) Konsistensi. Kebijakan dapat terlaksana dengan baik jika pelaksanaanya dilakukan secara konsisten sesuai dengan norma dan prosedur yang berlaku.
- 2) Transparansi. Transparansi ini akan ada apabila adanya kebebasan akses yang dapat dilakukan oleh sebuah kelompok atau public yang juga memiliki keperluan.

¹⁵ Desrinelti Desrinelti, Maghfirah Afifah, and Nurhizrah Gistituati, 'Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan', *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6.1 (2021), 83 <<https://doi.org/10.29210/3003906000>>.

Transparansi informasi ini memiliki sifat terbuka, mudah diakses, dimengerti, dan juga tersedia secara memadai.

- 3) Akuntabilitas. Dalam pelaksanaan kebijakan public ini dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Keadilan. Dalam sebuah pelaksanaan kebijakan publik, keadilan diartikan sebagai tidak membedakan dalam hal urusan setiap golongan dan juga tidak diskriminatif.
- 5) Partisipatif. Dalam pelaksanaan kebijakan publik partisipatif diartikan sebagai masyarakat turut terlibat dalam pelaksanaan kebijakan publik. Juga sebagai penopang pelaksanaan kebijakan publik dan sebagai sarana evaluasi, pengontrolan terhadap wewenang pelaksana kebijakan.
- 6) Efektifitas. Efektifitas ini erat hubungannya dengan pencapaian dari sebuah hasil kebijakan public yang berdasar pada tindakan dan aspek rasionalitas tindakan yang berhubungan dengan layanan produk.
- 7) Efisiensi. Dalam konsep ini efisiensi beraspekkan pada kuantitas maksimal sumber daya, seperti pencapaian tujuan, penggunaan manusia, biaya, waktu dan peralatan lainnya, sehingga efisiensi ini berdampak pada efektifitas pelaksanaan kebijakan.¹⁶

2. Kebijakan Publik Persepektif Islam

Indonesia merupakan negara yang memiliki enam agama yang dianut, akan tetapi Indonesia juga salah satu negara dengan mayoritas agama Islam. Dalam persepektif Islam kebijakan publik merupakan kebijakan yang Allah SWT turunkan dengan perantara Rasulullah, kemudian Al-Qur'an merupakan pedoman dalam mengambil sebuah kebijakan. Kebijakan publik diartikan sebagai kebijakan yang bersifat universal yang kemudian melahirkan kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan kebijakan publik dalam persepektif Islam, menurut **Imam Al-Ghazali** dan **Imam Asy-Syatibi** lebih menekankan pada pemenuhan pilar *maqashid shari'ah* untuk pencapaian kebijakan umum yang akan dikeluarkan oleh para pemimpin Islam (*ulil amri*) atau *siyasah*. Kebijakan publik persepektif Islam ini mempunyai enam prinsip utama dalam memperbaiki kemampuan kerja, diantaranya adalah sebagai berikut :

¹⁶ Abdullah Ramdhani and Muhammad Ali Ramdhani, 'Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik', *Jurnal Publik*, 2017, 1-12 <<https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>>.

- a. Ketuhanan(*ilahiah*): pada kegiatan yang setiap kali dilakukan dalam sebuah pembuatan atau perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik harus berorientasi pada ketuhanan.
- b. Kemanusiaan(*insaniah*): dalam hal ini kebijakan yang dilaksanakan berdasarkan pada sebuah tujuan kemakmuran dan kesejahteraan manusia, baik pada masa sekarang sampai pada masa mendatang.
- c. Keseimbangan(*tawazun*): kebijakan yang dibuat dalam dunia perpolitikan harus seimbang dan proporsional.
- d. Keadilan (*al- 'adalah*) : kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah harus adil dan juga tepat sasaran yang berdasar pada orientasi ketuhanan dan kemanusiaan.
- e. Pelayanan(*al-khadimah*): sesuai wewenang yang ada pada diri pemerintahan (kepemimpinan) yang berdasar pada asas ketuhanan, kemanusiaan, keseimbangan dan keadilan, sehingga kebijakan ini dibuat sesuai dengan orientasi yang kemudian melakukan pelayanan yang terbaik untuk masyarakatnya.
- f. Keteladanan(*uswah al-hasanah* : seorang perumus atau pemimpin yang membuat kebijakan, yang memeng hakikatnya digambarkan Rasulullah dalam secercah kalimat “ *sayyid al-qawn khaadimuhun* ” (pemimpin dari suatu kaum merupakan pelayan bagi mereka).

Kebijakan yang dibuat atau dirumuskan oleh pemerintah berorientasi pada ajaran islam, yang mana agama islam merupakan agama mayoritas di Indonesia. Dalam sebuah negara yang berdiri pastinya memiliki ideologi yang dianut, yang mana Indonesia sendiri menganut ideologi Pancasila dan UUD 1945. Ideologi ini sangat menekankan pada petingnya nilai agama dalam membuat sebuah keputusan/kebijakan. Pada sila pertama hingga sila kelima adalah sebuah pondasi untuk sebuah dasar kebijakan. Juga pastinya dalam suatu negara memiliki tujuan, tujuan bangsa Indonesia sendiri termaktub di UUD 1945 alinea keempat. Oleh sebab itu ajaran islam meupakan sebuah pondasi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan apapun. Sehingga kebijakan publik ini dianggap sesuai dengan ajaran islam, yang mana kebijakan ini memberikan kemaslahatan atau kesejahteraan untuk masyarakat. ¹⁷

Kebijakan publik juga dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an surat An-nisa : 59 yang berbunyi :

¹⁷ agus suarman Sudarsa, 'Kebijakan Publik Dalam Perspektif Islam', *Unida* <[21](https://unida.ac.id/artikel/kebijakan-publik-dalam-perspektif-islam#:~:text=Tegasnya%2C%20Kebijakan%20Publik%20yang%20sesuai,(maqashid%20syari%27ah).>>.</p>
</div>
<div data-bbox=)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Yang artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An Nisa: 59).

Pada ayat ini menjelaskan bahwa perlunya dan adanya ketaatan kepada pemimpin yang ada, baik itu Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, atau pemimpin sebuah negara. Dalam hal ini pemimpin sebuah negara atau kerajaan diurutkan dalam urutan ketiga setelah Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dikarenakan pemimpin adalah ikutan (*tabi'*) dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, ketika seorang pemimpin memerintahkan kepada bawahannya untuk melakukan hal yang buruk maka patutlah pemimpin itu ditunggalikan oleh pengikutnya.¹⁸

3. Teori Politik Pariwisata

Dewasa ini pariwisata merupakan sebuah orientasi yang berkembang dengan mengandalkan modal kapitalis yang juga menempatkan pariwisata yang kemudian dihadapkan dengan dominasi, hal ini dapat terjadi di daerah atau desa yang mengembangkan pariwisata. Pada kesempatan kali ini memiliki dua sumber yang akan berdominasi dalam pengelolaan desa wisata, yakni adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau bahkan menanamkan modal dan kemudian mengeruk sumber daya yang ada dan juga mengeruk potensi sumber daya lainnya sehingga menghasilkan desa wisata yang baik. Yang pada hasilnya masyarakat ini adalah salah satu representasi dari *civil cosiety* yang

¹⁸ Kastolani, 'Surat An Nisa Ayat 59: Latin, Arti, Makna Tentang Perintah Taat Kepada Allah Dan Ulil Amri', *INews* <[22](https://www.inews.id/lifestyle/muslim/surat-an-nisa-ayat-59-latin-arti-makna#:~:text=Latin%3A%20Yaaa%20ayyuhal%20ladziina%20aamanuu,dzaalika%20khairun%20wahsanu%20ta%20wiilaa.>>.</p>
</div>
<div data-bbox=)

kemungkinan akan didesak dengan adanya dua kekuatan politik yaitu negara dengan kebijakan yang berlaku dan juga kepentingan pasar yang memang dipengaruhi oleh kaum kapitalis. Dalam peristiwa yang akan terjadi saat ini pariwisata akan terganggu dan akan teombang-ambing dengan arus yang ada dinegara berkembang. Sehingga yang perlu dilakukan saat ini adalah pencegahan kehancuran sebagai salah satu dari akibat dari kepentingan negara dan juga kepentingan pasar, dengan ini politik pariwisata sangat diperlukan terutama dalam mencegah dominasi negara dalam kebijakan politik pariwisata.¹⁹

Menurut Pitana dan Gyatri pariwisata merupakan sebuah kegiatan perpindahan seseorang untuk melakukan perjalanan dengan jangka waktu sementara waktu ke destinasi tempat wisata yang terdapat di luar tempat tinggal dan tempat bekerjanya. Ketika melaksanakan kegiatan selama di destinasi telah menyiapkan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang mereka perlukan selama di destinasi tersebut.²⁰

Pariwisata yang baik adalah pariwisata yang memiliki daya tarik tersendiri, kemudahan dalam mendapatkan fasilitas, serta melakukan promosi yang baik. Pengelolaan pariwisata yang baik adalah pengelola yang memiliki sebuah perencanaan yang matang serta memiliki 3 dimensi kepentingan, yakni industri pariwisata, daya dukung atau daya tarik lingkungan (SDA), serta masyarakat yang mendukung dan mampu meningkatkan kualitas hidup. Berikut ini merupakan beberapa unsur untuk pengembangan pariwisata:²¹

a. Atraksi

Atraksi merupakan daya tarik yang ditimbulkan dari keadaan alam (keindahan alam, flora fauna, danau), juga dengan objek buatan manusia (museum, katedral, masjid kuno, makam kuno), atau bahkan unsur dan peristiwa budaya (kesenian, adat istiadat, makanan dan lain sebagainya), yang dianggap mampu sebagai daya tarik tersendiri untuk menarik wisatawan.

¹⁹ Dewa Putu Oka Prasiasa, 'Pengembangan Daerah Wisata Dalam Bingkai Politik Pariwisata', *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSIAI)*, 3.1 (2022), 55–68 <<https://doi.org/10.22373/jsai.v3i1.1658>>.

²⁰ "Mengenal Pengertian Pariwisata menurut para ahli, oleh Novi Fuji Astuti, 27 Oktober 2021. Merdeka.com. www.merdeka.com/jabar/mengenal-pengertian-pariwisata-menurut-paraahli " diakses pada 19 Juni 2023

²¹ "Pariwisata(pengetian, unsur, bentuk & jenis wisata). Muchlisin Riadi. 14 Desember 2019. www.kajianpustaka.com/pariwisata.pengertian.unsur.bentuk.jeniswisata." Diakses pada 19 Juni 2023

b. Transportasi

Dengan berjalannya waktu serta perkembangan teknologi yang terjadi saat ini, tentunya berpengaruh dalam sektor pariwisata. Transportasi merupakan salah satu sarana akomodasi yang mempunyai pengaruh atas fleksibilitas dalam sebuah perjalanan.

c. Akomodasi

Akomodasi merupakan tempat menginap untuk wisatawan yang datang ke tempat wisata, penginapan ini dibagi menjadi dua bagian yakni dibangun untuk umum dan bahkan perorangan.

d. Fasilitas pelayanan

Fasilitas pelayan ini dapat berkembang sesuai dengan apa yang dibutuhkan wisatawan. Perkembangan pertokoan dan jasa pelayanan kebutuhan sehari-hari, jasa perdagangan, jasa kenyamanan dan kesenangan untuk wisatawan, jasa yang menyangkut keamanan dan keselamatan, sehingga yang terjadi pada perkembangan selanjutnya adalah penjualan barang mewah.

e. Infrastruktur

Pada kali infrastruktur merupakan unsur wisata yang penting, infrastruktur yang memadai bisa mendukung jasa pelayan serta fasilitas pendukung yang lain guna pembangunan infrastruktur yang secara tidak langsung memberikan manfaat untuk penduduk sekitar, dalam hal ini tidak hanya dengan menyangkut pembangunan infrastruktur transportasi, namun juga penyediaan saluran air minum, penerang listrik dan saluran pembuangan limbah.

4. Pariwisata dalam Perspektif Islam

Dalam agama islam tentunya juga diajarkan adanya perjalanan-perjalanan yang memang memiliki tujuan tertentu. Pariwisata sendiri memiliki makna, yakni berawal dari kata “pari” yang memiliki arti banyak, berkali-kali, berputar-putar. Sedangkan kata “wisata” juga memiliki makna bepergian atau perjalanan, jadi pariwisata dapat diartikan sebagai kegiatan dengan unsur perjalanan atau bepergian dari satu tempat ketempat yang lain dengan tujuan tertentu. Dalam agama Islam pastinya juga memiliki arti tersendiri dalam ruang lingkup pariwisata, yang mana dalam islam sebuah perjalanan atau bepergian dengan tujuan untuk kesenangan dinamakan Rihlah. Arti Rihlah ini berbeda dengan safara yang memiliki artu bepergian untuk tujuan lebih universal.

Kata Rihlah ini sudah disinggung dalam Al-Qur'an yang mana hal ini merupakan sebuah lambing orang Quraisy melakukan sebuah perjalanan ketika musim dingin atau musim panas tiba. Dalam hal ini, suatu perjalanan yang disebut sebagai pariwisata ini pastinya memiliki tujuan, yakni sebagai berikut :

- a. *Business tourism*, yakni perjalanan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk kepentingan pekerjaan seperti perdagangan, atau dinas luar kota.
- b. *Vocational tourism*, yakni perjalanan yang memang sengaja dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam rangka untuk berlibur atau cuti kerja.
- c. *Educational tourism*, yakni perjalanan atau bepergian yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk pendidikan dana tau penelitian.

Dari ketiga hal tersebut merupakan skala garis besar tujuan seseorang atau kelompok untuk melakukan wisata. Sehingga dapat dilihat dari tujuan dari segi objeknya, yakni sebagai berikut :

- a. *Cultural tourism*, merupakan sebuah wisata dengan tujuan kebudayaan, seni, dan pertunjukan tradisional juga menampilkan sebuah atraksi budaya pada umumnya, kunjungan kelokasi peninggalan masa lalu dan sebagainya.
- b. *Recuperational tourism*, yakni wisata dengan tujuan penyegaran kesehatan.
- c. *Commercial tourism*, yakni bepergian dengan tujuan usaha atau dengan tujuan bisnis.
- d. *Sport tourism*, yakni wisata dengan tujuan untuk menyaksikan sebuah acara olahraga tertentu.
- e. *Political tourism*, yakni dimana sebuah perjalan untuk menyaksikan sebuah peristiwa tertentu disebuah negara.
- f. *Advantural tourism*, yakni sebuah perjalanan untuk berpetualang.
- g. *Social tourism*, merupaka sebuah perjalan dengan tujuan memberikan bantuan kesuatu tempat.
- h. *Religious tourism*, merupakan perjalana berwisata dengan nuansa keagamaan.²²

Dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 11-12 juga menjelaskan tentang wisata atau rekreasi, yakni sebagai berikut :

²² Shofwan Karim, 'Pembangunan Pariwisata Dalam Perspektif Islam', *TAJDID : Jurnal Ilmu Keislaman Dan Ushuluddin*, 16.1 (2019), 45-62 <<https://doi.org/10.15548/tajdid.v16i1.86>>.

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿١١﴾

Artinya : “bepergianlah dimuka bumi, kemudian perhatikanlah kesudahan orang-orang yang mendustakan itu”. (Q.S Al-an’am :11)

قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ

الرَّحْمَةَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَبَّ فِيهِ الَّذِينَ

خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾

Artinya : “kepunyaan siapakah apa yang ada dilangit dan bumi?” katakanlah : “kepunyaan Allah”. Dia telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang. Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman”. (Q.S.Al-an’am : 12)

Dari ayat 11 diatas menjelaskan bahwa, perintah bepergian dirangkaikan dengan perintah meneliti akibat yang dipikul oleh para pendusta. Kemudian pada ayat 12 menjelaskan untuk meyakini apa yang ada dilangit dan dibumi merupakan milik Allah SWT. dan sudah sepatutnya kita sebagai umatnya, sebagai manusia yang ada dimuka bumi ini memelihara atau bahkan mengunjungi tempat yang memang kita tidak tinggali, dengan ini bepergian atau berwisata merupakan sebuah fungsi untuk memepertebal keimanan seseorang.²³

Seiring berjalannya waktu muncul yang namanya wisata halal menurut salah satu tokoh yakni **Mohsin et al. (2020)** memaparkan bahwa pariwisata halal ini mengacu pada ketersediaan produk dan juga layanan pariwisata yang memang memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim untuk memfasilitasi ibadah dan persyaratan lainnya sesuai dengan syariat Islam. juga termasuk akan persepsi umat muslim yang memang menurut pandangan perilakunya merujuk pada kebudayaan dan kebiasaan pakaian, makanan juga perilaku pada daerah tersebut. Sebagai tuan rumah atau tempat yang memiliki tujuan wisata pastinya terdapat

²³ ‘Ayat Al-Qur’an Yang Menjelaskan Untuk Berwisata’, 1–9 <<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>>.

beberapa kriteria yang memang perlu diperhatikan dalam memberikan akomodasi atau kemudahan untuk wisatawan muslim untuk tetap beribadah sesuai dengan kewajiban umat muslim. Menurut Mohsin et al. (2020) ini terbagi menjadi beberapa hal:

a) Fasilitas ibadah

Dengan adanya media informasi terkait dengan adanya lokasi fasilitas ibadah terdekat, yang memang khususnya untuk laki-laki muslim yang memang memiliki kewajiban Sholat Jum'at. Tidak hanya itu, umat muslim juga memiliki kewajiban Sholat 5x dalam sehari, sehingga tuan rumah atau tempat yang memiliki destinasi wisata ini memiliki fasilitas tempat ibadah yang bersih dan menyediakan apa yang diperlukan seperti, sarung untuk lelaki dan mukena untuk perempuan serta sajadah.

b) Ketersediaan makanan halal

Pada kali ini yang dimaksud dengan makanan halal ialah dengan disediakannya makanan yang memang sudah terjamin kehalalannya. Tak hanya terkait dengan pemilihannya, akan tetapi juga dengan cara penyembelihan hingga pengolahan dan juga syarat wajib yang sesuai dengan syariat Islam. Sehingga wisatawan bisa berkunjung atau mendatangi tempat makan yang memang sudah ada sertifikasi halalnya, atau jika memang ragu bisa membeli makanan atau minuman yang berlogo halal.

c) Atribut yang lain-lain

Destinasi wisata yang dituju memiliki adab dan kesopanan sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama islam, juga termasuk kebiasaan-kebiasaan terhadap pakaian, sopan santun dan lain sebagainya. Sehingga tempat wisata memiliki fasilitas penginapan syariah yang memang tidak menjurus kemaksiatan.²⁴

Dari penjelasan diatas tentunya pariwisata sendiri memiliki makna yang berbau atau bernuansa agama, dimana diatas telah dijelaskan bahwa adanya berwisata agama dari segi objeknya, dimana wisata agama ini dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan ketempat ziarah atau bahkan melakukan wisata haji atau umroh karena panggilan Allah SWT. Sehingga dalam hal ini pariwisata merupakan sebuah aspek muamalah dari perwujudan kehidupan social dan juga ekonomi. Dimana agama islam sendiri menganggap aksi social dan amaliah ini senantiasa disandarkan ke

²⁴ “ halal Tourism, Definisi, ruang lingkup, dan potensi pengembangan wisata halal.

<https://shafiec.unu-jogja.ac.id/2022/07/halal-tourism-1-definisi-ruang-lingkup-dan-potensi-pengembangan-wisata-halal/> . diakses pada 14 Juli 2023

makna yang biasa disebut dengan *maqashid al-syari'ah*, yang mana syariat ini merupakan sebuah perwujudan kemaslahatan masyarakat sevara keseluruhan baik itu didunia atau bahkan diakhirat. Kemudian disamping hal tersebut, pastinya juga mempertimbangkan antara kemaslahatan dan mafsadat (keburukan), yang mana menghindari keburukan lebih baik dari pada mengambil kebaikan. Sehingga mengambil keputusan tang terbaik dari pada baik juga lebih diutamakan.

Dalam hal ini apabila pariwisata memberikan manfaat maka pandangan islam merupakan sebuah pandangan yang positif, begitu pula sebaliknya jika pariwisata itu memberikan dampak keburukan maka islam memandang pariwisata merupakan hal yang negatif. Sehingga dalam hal seperti ini berlaku kaidah menghindari mafsadat (keburukan) lebih utama dari pada mengambil keputusan kebaikan (maslahat). Oleh sebab itu islam akan memberikan pandangan positif terhadap pariwisata apabila mencapainya dengan tujuan baik. Berbanding terbalik jika agam islam memandang pariwisata itu negatif apabila manusia melakukan perjalanan dengan tujuan kesenangan manusia dan masyarakat dengan cara yang menyimpang dari agama dan juga kemauan syariat, maka hal ini ditolak atau dianggap negatif.²⁵ <https://shafiec.unu-jogja.ac.id/2022/07/halal-tourism-1-definisi-ruang-lingkup-dan-potensi-pengembangan-wisata-halal/>

5. Teori Relasi Antar Aktor

Aktor atau yang disebut dengan *stakeholder* ialah suatu kelompok atau individu yang memiliki tujuan tertentu dan cenderung memiliki kekuasaan. Dalam hal ini aktor terlibat secara aktif dalam segala bentuk kegiatan sehingga aktor juga dapat merasakan dampaknya, baik itu dampak positif atau bahkan dampak negatif. Aktor juga berperan aktif dalam hal untuk mencapai tujuan, baik itu tujuan formal maupun informal. Tujuan formal ialah untuk pelayanan kepentingan umum, sedangkan tujuan informal dari aktor ialah untuk bertahan juga memperluas kepentingan organisasi, mengoptimalkan kekuasaan, anggaran serta staf secara serentak. Dalam tujuan tersebut dapat dikatakan masuk akal apabila aktor tersebut mampu menjalankan tujuannya dan juga mendapatkan keuntungan pribadi.

Dengan adanya tujuan tersebut, pastinya juga terdapat struktur sosial yang terbentuk untuk mencapai tujuan tersebut.

²⁵ Karim.

Dimana struktur sosial ini terdapat dari beberapa unsur, yaitu kekuasaan yang merupakan suatu keberhasilan pemerintahan yang unsur anggotanya merupakan dari masyarakat mampu mempertahankan kekuasaan, sehingga sistem tepai berjalan dengan baik. Dalam hal ini kekuasaan dapat diartikan sebagai bagaimana seseorang dapat mempengaruhi orang lain atau kelompok serta sesuai dengan apa yang diekspektasikan atau yang diinginkan oleh pelaku. Sehingga para aktor ini mampu mengembangkan diri menjadi relasi yang juga memiliki kepentingan atau bahkan tujuan tertentu, bahkan dengan adanya relasi antar aktor ini juga terdapat unsur kekuasaan yang mana aktor yang satu mampu mempengaruhi aktor yang lainnya, atau bahkan relasi antar aktor ini mampu membuat program atau kegiatan baru yang sesuai dengan kepentingan seseorang, atau bahkan membuat perlawanan antar aktor lainnya.

Dalam hal ini relasi kuasa dibagi dalam tiga elemen dan hal ini juga bersifat mengikat antara satu aktor dan juga beberapa aktor yang terlibat, adapun elemen tersebut anatara lain sebagai berikut:

- a. *Power coercion*(kekuasaan) yakni perilaku yang dianggap dapat membatasi seseorang dalam hal tertentu. Yang mana dalam kehidupan sosial ini erat kaitannya dengan yang namanya kekuasaan, juga dengan pemaksaan yang dapat terjadi dari satu piha terhadap pihak lainnya yang terjadi karena adanya kekuasaan seorang aktor yang juga dapat mengubah perilaku aktor lainnya.
- b. *Incentives* adalah informasi yang juga berkaitan dengan aktor (satakeholder) yang mampu memberi bantuan berupa pelatihan atau bahkan bantuan berupa pengelolaan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini dapat diartikan sebagai merubah perilaku subordinat dengan memberikan dampak positif atau bahkan dampak negatif.
- c. *Dominan infomasi(trust)* yang dapat diartikan sebaga merubah perilaku dengan cara memalidasi informasi, informasi ini dapat dibagi menjadi informasi murni, yang merupakan informasi yang mendapatkan *feedback* oleh penerima, atau bahkan tidak sama sekali mendapatkan *feedback* dikarenakan kurangnya ketidakpercayaan yang dimiliki. Dominan informasi ialah sebuah kekuatan, tanpa adanya informasi aktor tidak dapat bergerak dengn cepat dan juga sesuai sasaran.²⁶

²⁶ Rezky Azhurah Darman, 'Analisis Aktor, Relasi Kuasa Dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Hutan Desa Labbo', 2017.

6. Teori Pengelolaan wisata

Dengan adanya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah bahwa setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengembangkan wilayahnya, yang dalam pengembangannya dapat dilakukan oleh pemerintah, swasta atau bahkan masyarakat. Sehingga yang diharapkan ialah komunitas atau organisasi resmi atau bahkan tidak resmi mampu melakukan pengelolaan potensi dan sumber daya yang ada di daerahnya guna mencapai tujuan internal ataupun eksternal suatu komunitas atau organisasi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengelolaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan, mengelola, atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain dan atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Istilah pengelolaan sendiri bermula dari kata “*management*” yang memiliki arti sebuah proses yang menggunakan sumber daya dengan cara yang efektif guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Yang kemudian kata manajemen itu sendiri diartikan sebagai suatu kegiatan, yang pelaksanaannya melalui *managing* (pengelolaan) serta pelaksanaannya disebut sebagai *manager* (pengelola). Dalam hal ini pengelolaan pastinya memiliki fungsi tersendiri, fungsi tersebut sebagai berikut:

a. Perencanaan(*planning*)

Dalam pengelolaan perencanaan diartikan sebagai penentuan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan kinerja organisasi atau komunitas dimasa mendatang juga sebagai ajang penetapan penugasan serta sumber daya apa saja yang akan diperlukan guna mencapai tujuan.

b. Pengorganisasian(*organizing*)

Pengorganisasian merupakan sebuah langkah pengelompokan kegiatan guna mencapai tujuan serta penetapan penugasan setiap kelompok kepada manager yang dianggap memiliki kekuasaan dalam mengawasi setiap anggota kelompok.

c. Pengarahan(*actuating*)

Pengarahan merupakan suatu kegiatan yang dianggap mengsuggesti anggotanya untuk menhikuti keinginan manager atau orang yang memiliki kekuasaan dengan menggunakan kekuatan pribadi sebagai salah pencapai tujuan.²⁷

²⁷ Fabiana Meijon Fadul, ‘BAB II LANDASAN TEORI’, 32, 2019, 15–40.

d. Pengawasan(*controlling*)

Pengawasan ini dilakukan sebagai alat perbandingan dan pengukura kegiatan yang sedang dilakukan atau bahkan sudah dilakukan sesuai dengan kriteria, norma, standard dan juga rencana yang sudah ditetapkan.²⁸

B. Peneliti Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama peneliti	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Achmad Sja'fii	Kebijakan Pengembangan Pariwisata Daerah	Persamaan dari dilakukannya penelitian ini adalah, penelitian yang lebih mengembangkan pariwisata tingkat daerah yang mana lebih menekankan pada aspek ekonomi, social budaya dan juga lingkungan.	Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah, penelitian yang cenderung ke pengembangan desa wisata. Yang kemudian mampu membangun dampak positif dari aspek ekonomi dan lain sebagainya.
2.	Muchtar Wisnu Wardoyo & Bahtaru'uddin	Kebijakan Pengembangan Kepariwisata'an (studi kasus perumusan kebijakan desa wisata karang katenger kecamatan Baturraden, kabupaten Banyumas)	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai desa wisata dan masalah kebijakan yang terkait dengan desa wisata.	Sedangkan perbedaan dari penelitian adalah menunjukkan proses dalam perumusan sebuah kebijakan desa wisata yang secara Bottom Up, yang artinya ide pemikiran dan perencanaannya hasil dari masyarakat, sehingga pemerintah hanya berperan sebagai Pembina saja.
3.	Hasnawati	Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di	Persamaan dari penelitian ini hampir sama	Perbedaan dari penelitian ini cenderung terlalu

²⁸ Fabiana Meijon Fadul.

		Kawasan Malino Kabupaten Gowa	dalam segi pembahasan dan jugametode penelitiannya mempunyai kesamaan, yaitu pembahasan kebijakan pariwisata dengan menggunakan metode kualitatif dekriptif dalam melakukan penelitiannya.	luas, sehingga kemungkinan kebijakannya sama, tetapi dalam ranah implementasinya berbeda.
4.	Robby Zuniadi	Politik Anggaran Dan Pengelola Retribusi Pada Objek Wisata Di Aceh Selatan	Penelitian ini hampir sama dengan penelitian sebelumnya yakni sama memiliki masalah kebijakan kepariwisataan. Metode dalam penelitiannya pun sama menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah tujuan untuk mengetahui pola kebijakan anggaran dalam sector pariwisata dan mengetahui kebijakan alokasi anggaran.
5.	Engga Satruko	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Teluk Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus	Penelitian ini sama-sama menjelaskan kebijakan pariwisata dalam penelitian ini juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya menjelaskan peranan pemerintah dalam pengolahan potensi pariwisata sedangkan penelitian kali ini menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan pemerintah.

Jadi, penelitian kali ini hampir sama dengan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Yakni penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Kemudian juga lebih menekankan pada potensi alam, social budaya dan lingkungan. Sehingga kebijakannya sudah terarah dan kebijakannya sudah berjalan dengan baik. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah kebijakan yang diambil belum jelas, dan juga pemerintah cenderung ke pembinaan.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian dengan judul kebijakan politik pariwisata dalam pengelolaan desa wisata plajan kecamatan pakis aji Kabupaten Jepara diharapkan dapat memberikan sebuah gambaran atau penjelasan singkat mengenai alur variable penelitian itu sendiri. Berikut merupak alur dai kerangka berpikir yang digambarkan dalam pola dibawah ini :

Gambar 2.2
Kerangka Teori

